

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 7 - No. 2, Desember 2010

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Okky Andriyan

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
andriyan_ik@yahoo.com

Supatmi

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
patmie@staff.uksw.edu

Abstract

This research is aimed to find out the influence of Corporate Governance (CG) mechanisms to the banking financial performance. As a regulated industry, this research wants to prove that the banking financial performance can be influenced by CG mechanisms, not just its compliance to the banking regulations. The samples in this research are the non-governmental rural banks (Bank Perkreditan Rakyat) in Central Java. The financial performance of the BPR is measured by the ratio of NPL, KPMM, LDR, and ROA. CG mechanisms are measured by its managerial ownerships, the proportion of the outside directors, and the number of board of directors (BOD), while the control variables are the size of the BPR and the firm age of the BPR. This research finds the CG mechanisms simultaneously influence the ratio of NPL, KPMM, and ROA. The managerial ownerships and the proportion of the outside directors partially also show a negative influence to the ratio of NPL and ROA, and the number of BOD in partial shows a negative influence towards the ratio of LDR.

Keywords: *corporate governance mechanism, financial performance, rural banks*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* (CG) terhadap kinerja keuangan perbankan. Sebagai industri yang teregulasi, penelitian ini ingin membuktikan bahwa kinerja keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh mekanisme CG-nya, bukan hanya sekedar pemenuhan ketentuan perbankan. Sampel penelitian adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) swasta di Jawa Tengah. Kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio NPL, KPMM, LDR, dan ROA. Mekanisme CG diproksi dengan kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors* (BOD), dengan variabel kontrol ukuran BPR dan umur BPR. Hasil penelitian menemukan mekanisme CG secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio NPL dan ROA, sedangkan jumlah BOD berpengaruh negatif terhadap rasio LDR.

Kata kunci: *mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, BPR*

PENDAHULUAN

Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tahun 2006 melalui Direktorat Pengawasan

BPR menyatakan bahwa perekonomian Indonesia bertumpu pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pembangunan yang terfokus pada pemberdayaan UMKM merupakan salah satu dasar penetapan strategi

pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Karakteristik khusus yang dimiliki BPR dalam memberikan pelayanan perbankan kepada UMKM di daerah pedesaan dan pinggiran kota sangat diharapkan dapat lebih meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan UMKM.

Populasi UMKM menurut Dewan Riset Daerah di Jawa Tengah mencapai 90% dari total industri yang ada, jumlah UMKM yang cukup besar ini memberikan peluang bagi BPR di Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan terhadap UMKM. Namun perkembangan BPR di Jawa Tengah menghadapi kendala akibat persaingan dengan bank umum yang juga membidik UMKM sebagai sasaran penyaluran kredit. UMKM dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi.

Untuk dapat memaksimalkan peran BPR dalam menopang UMKM dan menghadapi persaingan di antara lembaga keuangan lainnya, maka kinerja keuangan BPR perlu ditingkatkan. BPR sebagai lembaga di bawah pengawasan BI, diharuskan untuk menjaga kinerja keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ingin tetap beroperasi. Kondisi ini yang sering dianggap menjadi pendorong utama bagi BPR untuk menjaga kinerja keuangannya, baik BPR berbasis swasta ataupun pemerintah, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Di sisi lain, pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajer dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager et al. 2003).

Penguatan kondisi internal BPR diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan BPR yang lebih baik sehingga BPR dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. Selain itu salah satu tujuan penting dari pendirian perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham dan memaksimalkan kekayaan pemegang

saham (Brigham dan Houston 2006). Namun dalam upaya mencapai hal-hal di atas terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh BPR, salah satunya yaitu munculnya konflik keagenan sebagai akibat dari pemisahan antara pemegang saham dan manajemen.

Struktur kepemilikan dalam BPR swasta dimana sahamnya dimiliki oleh beberapa pemegang saham yang secara individu mempunyai latar belakang, kompetensi dan pemikiran yang berbeda diduga dapat menimbulkan masalah keagenan dibandingkan dengan BPR berbasis pemerintah. Moh'd et al. (1998) dalam Midiastuty dan Machfoedz (2003) menilai kepemilikan saham oleh investor institusional mampu mengendalikan perilaku oportunistik manajer sehingga konflik keagenan menjadi berkurang. Pemerintah daerah dinilai merupakan *sophisticated investor* dan memiliki informasi yang banyak tentang perusahaan (*informed investor*), sehingga manipulasi laba karena asimetri informasi dapat dikurangi. Oleh karena itu penelitian ini lebih berfokus pada BPR swasta yang diduga lebih rentan terhadap konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Mekanisme *corporate governance* (CG) sebagai upaya penegakan praktik CG dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan juga diharapkan mampu untuk mengontrol biaya keagenan (Iturriaga dan Sanz 1998 dalam Suranta dan Machfoedz 2003). Menurut Walsh dan Seward (1990) dalam Arifin (2005), mekanisme CG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Sedangkan mekanisme CG menurut Boediono (2005) adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

Wulandari (2006) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh mekanisme CG (yang dilihat dari jumlah direktur, proporsi dewan komisaris independen, *debt to equity ratio* (DER) dan kepemilikan institusional) terhadap kinerja perusahaan yang memperoleh hasil bahwa hanya variabel DER yang berpengaruh

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) juga menyatakan bahwa variabel mekanisme CG (dalam hal ini kepemilikan manajerial dan ukuran dewan) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dimana kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh negatif sedangkan ukuran dewan menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian oleh Sam'ani (2008) menemukan bukti empiris adanya pengaruh indikator mekanisme CG terhadap kinerja keuangan perbankan.

Mengacu pada hasil-hasil penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh mekanisme CG terhadap kinerja keuangan BPR, dengan obyek penelitian yaitu BPR swasta yang beroperasi di Propinsi Jawa Tengah. Mekanisme CG akan dilihat dari aspek kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors* dan jumlah *board of directors* (BOD). Sedangkan kinerja keuangan BPR akan diukur dari *Non Performing Loan* (NPL), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return on Assets* (ROA).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri BPR khususnya mengenai pengaruh mekanisme CG terhadap peningkatan kinerja BPR agar di masa yang akan datang industri BPR semakin menyadari perlunya menerapkan CG yang efektif dan efisien dalam aktivitas pengelolaan perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepastiaan atau referensi empiris mengenai pengaruh pelaksanaan CG di Indonesia, khususnya mengenai pengaruh mekanisme CG terhadap kinerja keuangan BPR.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

BPR dan Ukuran Kinerja Keuangan BPR

Pengertian BPR menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah: "*Bank Perkreditan Rakyat adalah bank*

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Tujuan umum BPR mengacu pada pasal 3 peraturan tersebut yaitu : "*Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak*". Sedangkan bentuk badan hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah (Kasmir 2007, 45).

Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu (Helfert 2008). Menurut Ujijantho dan Pramuka (2007) penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh pihak BPR kepada BI dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis mengenai baik buruknya kinerja keuangan suatu BPR. Dalam penelitian ini kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio-rasio keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Berikut ini rasio keuangan yang digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan BPR:

- a) Aspek dari *Assets Quality* diwakili oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL adalah perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen BPR dalam mengelola kredit bermasalah yang merupakan risiko yang dihadapi oleh BPR karena menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit

- bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yang dapat mengganggu kinerja bank (Nasser 2003). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BI, NPL adalah kredit yang termasuk dalam kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet, dimana rasio NPL dalam suatu bank tidak boleh melebihi 5%.
- b) Aspek dari *Capital Adequacy* diwakili oleh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). KPMM menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menunjang kebutuhan BPR. Sesuai dengan Surat Edaran BI No. 8/28/DPBPR tahun 2006, maka KPMM untuk BPR ditetapkan tidak boleh kurang dari 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut sesuai ketentuan BI.
- c) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mewakili aspek likuiditas dalam industri BPR. Likuiditas suatu BPR berkaitan dengan ketersediaan dana BPR pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas BPR yang tercermin dalam rasio LDR dilakukan dengan tujuan supaya BPR dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar terutama kewajiban jangka pendek seperti simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito. Rasio LDR menunjukkan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPR. BPR mempunyai kewajiban untuk menjaga LDR pada tingkat yang ideal, berdasarkan ketentuan BI besarnya LDR yang ideal yaitu antara 78%-100%.
- d) Rasio *Return On Assets* (ROA) mewakili aspek *earnings* dalam

analisis kinerja keuangan BPR. Rasio ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih (Kuncoro dan Suhardjono 2002, 550). Semakin besar rasio ROA menunjukkan tingkat pencapaian laba yang semakin besar sebagai indikator efisiensi operasional BPR.

Mekanisme Corporate Governance

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu bentuk kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa pekerjaan bagi prinsipal dengan melibatkan pen delegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajer yang dalam hal ini berlaku sebagai agen mempunyai kewajiban moral untuk mengelola perusahaan secara efisien untuk mengoptimalkan laba bagi para pemilik selaku prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik saham dan manajer terjadi karena kemungkinan manajer (*agent*) tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik (*principal*), sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Ujiyantho dan Pramuka 2007).

Ketidakseimbangan penguasaan informasi dimana manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja perusahaan (Richardson 1998).

Mekanisme CG diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer

dan pemegang saham dan diharapkan mampu untuk mengontrol biaya keagenan. Mekanisme CG didefinisikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut (Arifin 2005). Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward 1990 dalam Arifin 2005).

Selanjutnya Walsh dan Seward (1990) dalam Arifin (2005) berpendapat bahwa terdapat dua mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam rangka penerapan CG. Dua mekanisme tersebut adalah mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar. Beiner et al. (2003) mengemukakan bahwa indikator mekanisme CG internal dalam perusahaan antara lain proporsi direktur independen dan jumlah BOD. Sedangkan indikator mekanisme CG eksternal menurut Rezaee (2009) adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar (*market for corporate control*).

Pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajer dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager et al. 2003).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan BPR

Kepemilikan manajerial dalam BPR adalah besarnya porsi saham yang dimiliki oleh manajer terhadap total saham di BPR. Menurut Jensen (1993) sebagaimana dikutip Faizal (2004), perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah

yang berimplikasi pada biaya keagenan yang rendah pula. Dalam penelitian ini konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan pada tingginya prosentase KPMM dan ROA, prosentase NPL yang semakin kecil dan besaran LDR yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh BI. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, manajemen BPR akan berusaha memaksimalkan kepentingan para pemegang saham, karena manajemen BPR akan memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba. Maka dapat diduga bahwa manajemen BPR akan mempunyai dorongan untuk meningkatkan kinerjanya dengan berupaya untuk mengelola kredit yang disalurkan secara lebih hati-hati (*prudent*).

Menurut Jensen (1993) seperti dikutip dalam Faizal (2004), hipotesis pemusatan kepentingan (*convergence of interest hypothesis*) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer sekaligus sebagai seorang pemilik saham. Jensen (1993) dalam Faizal (2004) berpendapat bahwa semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1995-1999 membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang mengontrol dan meminimalkan perilaku manipulasi laba oleh manajer dalam rangka untuk mengatur kinerja keuangan sesuai kepentingan manajemen.

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) dengan menggunakan sampel 74 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2004 memperoleh bukti empiris dimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan adalah negatif. Sejalan dengan penelitian Lasfer dan Faccio (1999), Suranta dan Machfoedz (2003) juga menemukan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kinerja

perusahaan. Hasil penelitian Soliha dan Taswan sebagaimana dikutip dalam Christiawan dan Tarigan (2007) menemukan terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.

Pengaruh Proporsi Outside Directors Terhadap Kinerja Keuangan BPR

Struktur BOD yang berkembang di Indonesia sesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) lapis (*two-tier board*), yakni Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Menurut Rezaee (2009, 99) struktur BOD ini merupakan warisan tradisi hukum sipil Belanda yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi secara berjenjang. Struktur dewan yang pertama yaitu *supervisory board*, di Indonesia disebut dengan dewan komisaris atau *board of commissioner* (BOC) dimana *chairman* atau komisaris utama sebagai ketua dewan komisaris tersebut. Struktur dewan yang kedua yaitu *management board*, disebut dengan dewan direksi atau *board of director* (BOD) dimana dewan direksi dipimpin oleh *chief executive officer* (CEO) atau direktur utama.

BI melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR menyatakan bahwa independensi direksi BPR meliputi: (1) Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris, (2) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, (3) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Sedangkan untuk dewan komisaris independensi yang disyaratkan oleh BI melalui PBI No. 8/26/PBI/2006 meliputi: (1) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan komisaris paling banyak pada 2 BPR/BPRS lain (2) Anggota dewan komisaris dilarang

merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Peran *outside directors* dalam struktur BOD sebagai upaya untuk mengurangi potensi terjadinya *conflict of interest* antara prinsipal dan agen karena *outside directors* tersebut berperan dalam fungsi pengawasan (*monitoring*) dan pengendalian (*controlling*) terhadap berbagai kebijakan perusahaan. Fama (1980) dan Weir et al. (2000) berpendapat bahwa fungsi utama *outside directors* adalah untuk memastikan dewan direksi melaksanakan atau mengikuti kebijakan yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terwakili oleh peran *outside directors* dengan beberapa persyaratan independensi yang melekat didalamnya yang dinilai memiliki pandangan yang lebih obyektif dalam mempertimbangkan kebijakan perusahaan.

Hasil penelitian Chtourou et al. (2001) dan Dechow et al. (1996) dalam Sam'ani (2008) mendukung pernyataan bahwa proporsi *outside directors* berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Ini juga sejalan dengan hasil penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) yang memperoleh bukti empiris dimana *outside directors* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya hasil penelitian oleh Baysinger et al. (1991) menyatakan bahwa proporsi *outside directors* memiliki hubungan negatif dengan kinerja perusahaan. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa *outside directors* bukan merupakan faktor dari kinerja dikemukakan oleh Kesner dan Johnson (1990) dalam Wardhani (2006).

Keberadaan *outside directors* dalam komposisi BOD pada BPR diduga berpengaruh terhadap kinerja BPR. Dengan meningkatnya jumlah *outside directors* dalam BPR diharapkan pengawasan terhadap manajemen BPR dalam melaksanakan kebijakan perusahaan menjadi semakin kuat. Dengan monitoring yang efektif tersebut diduga dapat mengendalikan manajer untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis:

H₂ : Proporsi *outside directors* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.

Pengaruh Jumlah Board of Directors terhadap Kinerja Keuangan BPR

Mizruchi (1983) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa BOD merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan serta merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Struktur BOD yang berkembang di Indonesia sesuai dengan UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) lapis (*two-tier board*), yakni dewan direksi dan dewan komisaris. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Banyak sedikitnya jumlah BOD mempunyai pengaruh yang besar terhadap mekanisme CG. Fungsi pengawasan dan pengendalian menjadi salah satu item dalam menilai kuatnya CG melekat dalam struktur BOD, sehingga dengan jumlah direktur yang optimal dapat mengendalikan setiap keputusan bisnis perusahaan (Raheja 2005).

Jumlah BOD dalam BPR dinilai dapat mempengaruhi kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian internal dalam rangka pengelolaan BPR yang sesuai dengan ketentuan *prudential banking*. Jika peran dan fungsi BOD dalam BPR dijalankan dengan baik, maka dapat diduga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR, karena jumlah BOD dinilai berkaitan dengan kuat lemahnya pengawasan terhadap manajemen BPR. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional BPR sehingga dapat mempengaruhi kinerja BPR dari waktu ke waktu.

Hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah BOD terhadap kinerja perusahaan masih menunjukkan adanya perbedaan. Yermack (1996) dalam Sam'ani (2008), Beiner et al. (2003) menemukan hubungan negatif antara jumlah BOD dengan kinerja perusahaan. Mereka juga berpendapat bahwa sistem CG yang tidak berjalan dengan baik dalam perusahaan juga dikarakteristikan dengan jumlah BOD yang besar. Jumlah BOD yang besar dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri serta dapat menimbulkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996; Jensen 1993 dalam Sam'ani 2008).

Bertolak belakang dengan pendapat di atas penelitian Wardhani (2006) menemukan adanya hubungan yang positif antara jumlah BOD dengan probabilitas perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Belkhir (2008) terhadap 174 bank dan perusahaan simpan-pinjam yang terdaftar pada Standard & Poor's 1500 dengan data dari tahun 1995-2002 yang menemukan bukti adanya hubungan positif antara jumlah direktur dan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pandangan *resources dependence* dimana jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan (Pfefer 1973; Pearce dan Zahra 1992 sebagaimana dikutip Faizal 2004). Selanjutnya juga diungkapkan bahwa peningkatan jumlah dan diversitas dari dewan akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya.

Jika dikaitkan dengan besaran perusahaan, makin besar ukuran perusahaan, secara umum makin tinggi kompleksitas transaksinya. Terkait dengan perbankan, makin besar bank maka makin kompleks transaksi dan tekanan publik yang dihadapi oleh bank. Untuk itu makin besar bank maka makin banyak jumlah BOD yang dibutuhkan. Hal ini mengingat jumlah BOD berperan dalam memainkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap setiap

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria-Kriteria Sampel	Jumlah
1. BPR Swasta di Jawa Tengah yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia tahun 2010	199
2. BPR Swasta di Jawa Tengah yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahun 2009	(38)
3. BPR Swasta di Jawa Tengah yang umurnya tidak diketahui	(20)
Sampel yang digunakan	141

aktivitas perusahaan, yang juga berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas BOD (Rezaee 2009, 103) dalam mempertimbangkan keputusan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis:

H₃: Jumlah BOD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) swasta yang beroperasi di Propinsi Jawa Tengah menurut Direktori Perbankan Indonesia 2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Tabel 1 menunjukkan hasil pemilihan sampel penelitian.

Dari 199 BPR swasta yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia di wilayah propinsi Jawa Tengah pada tahun 2010, 141 BPR memenuhi persyaratan untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan demikian sampel penelitian tersebut mewakili 70,85% dari populasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BPR swasta tahun 2009 yang bersifat kuantitatif dan dipublikasikan dalam Direktori Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan BPR yang diukur dari empat rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Non Performing Loan (NPL)*, diukur dari jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), diukur dari perbandingan antara jumlah modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko.
3. *Loan to Debt Ratio (LDR)*, diukur dari total kredit yang disalurkan dibagi dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPR.
4. *Return on Assets (ROA)*, diukur dari perbandingan antara *net income* atau laba bersih sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh BPR.

Data kinerja keuangan ini sudah tersedia dalam laporan keuangan BPR tahun 2009 yang dipublikasikan dalam Direktori Perbankan Bank Indonesia. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga komponen mekanisme *corporate governance* yaitu:

1. Kepemilikan manajerial, diukur dengan menjumlahkan total saham yang dimiliki oleh manajemen BPR (dalam hal ini direksi dan komisaris) dibagi dengan total keseluruhan saham BPR (Diyah dan Widanar 2009).
2. Proporsi *outside directors*, diukur dari jumlah direktur independen (dalam hal ini mencakup komisaris independen dan direktur independen) dibagi dengan keseluruhan jumlah BOD (Belkhir 2008).
3. Jumlah *board of directors (BOD)*, adalah jumlah direksi dan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran BPR dan umur BPR.

Darmawati et al. (2004) menyatakan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate governance* masih belum jelas arahnya. Perusahaan yang besar mungkin terdapat masalah keagenan yang besar, sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Sebaliknya perusahaan kecil dapat memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja supaya dapat memperoleh kepercayaan dari investor maupun kreditor dalam hal pengumpulan dana. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol, dan diukur dengan logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh BPR (Darmawati et al. 2004).

Variabel kontrol yang kedua adalah umur perusahaan, dengan asumsi bahwa perusahaan yang lebih tua telah menikmati pembelajaran sehingga memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan yang lebih tua dianggap lebih *profitable* atau memiliki kinerja yang relatif lebih baik karena terlebih dulu menguasai kondisi pasar yang mencakup karakteristik, proses dan dinamika yang terjadi di pasar tersebut (Majumdar 1997 dalam Tania 2009). Umur perusahaan dihitung dari tahun berdirinya BPR hingga tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensia dengan menggunakan analisis regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$KK = \alpha + \beta_1 MOWN + \beta_2 OUT + \beta_3 BOD + \beta_4 SIZE + \beta_5 AGE + \varepsilon$$

Keterangan:

α : konstanta

β : koefisien

ε : *error*

KK : Kinerja keuangan BPR

MOWN: Prosentase Kepemilikan Manajerial

OUT : Proporsi *Outside Directors*

BOD : Jumlah *Board of Directors*

SIZE : Ukuran Perusahaan

AGE : Umur Perusahaan

HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif data penelitian. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara umum BPR swasta di Jawa Tengah selama periode penelitian memiliki kinerja keuangan rata-rata yang baik, kecuali NPL. Rata-rata NPL dari sampel sebesar 8,54% yang menunjukkan bahwa rasio NPL tersebut melebihi batas maksimum yang disyaratkan oleh BI sebesar 5%. BPR dengan rasio NPL lebih dari 5% berjumlah 72 BPR dimana jumlah ini merupakan separuh dari total sampel dalam penelitian ini. Hal ini dapat diartikan rata-rata BPR swasta di Jawa Tengah memiliki tingkat risiko kredit bermasalah yang tinggi. Kondisi ini terjadi diduga sebagai dampak kenaikan suku bunga selama tahun 2009 yang cukup tinggi. Sedangkan rata-rata kinerja keuangan untuk KPMM, LDR dan ROA telah sesuai dengan ketentuan BI, yaitu rata-rata KPMM lebih dari 8%, rata-rata LDR berada di antara rentang 78%-100%, dan rata-rata ROA sebesar 4,44%.

Rata-rata kepemilikan manajerial dalam BPR swasta di Jawa Tengah sebesar 36,207%. Meski demikian, terdapat 41 BPR yang tidak ada kepemilikan manajerial alias seluruh kepemilikan BPR oleh pihak di luar manajemen, namun sebaliknya ada 7 BPR dengan kepemilikan penuh oleh manajemen. Sedangkan untuk proporsi *outside directors*, rata-rata BPR swasta memiliki proporsi *outside directors* yang cukup tinggi, yaitu sebesar 69,89% atau sebesar tiga direktur independen. Dari Tabel 2 juga dapat diketahui jumlah rerata BOD (dalam hal ini direksi dan komisaris) yaitu sebesar 4 (empat) direktur. BPR swasta di Jawa Tengah rata-rata berumur 11 tahun, yang berarti BPR-BPR tersebut sudah cukup lama beroperasi.

Hasil uji korelasi (lihat Tabel 3) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dengan proporsi *outside directors* namun berhubungan positif dengan jumlah BOD. Ini berarti makin tinggi kepemilikan manajerial di BPR maka makin

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
NPL	141	0,03	60,57	8,5404	10,42301
KPMM	141	5,39	318	25,9130	28,26625
LDR	141	50,22	585,86	87,1375	45,82711
ROA	141	-72,81	89,12	4,4365	11,32731
MOWN	141	0	100	36,2072	36,28679
OUT	141	0	100	69,8631	25,77568
BOD	141	2	7	4,0142	0,84503
SIZE	141	15,11	25,73	23,0037	1,11680
AGE	141	1	21	11,3830	4,50343

Tabel 3
Ringkasan Hasil Pearson Correlation

Variabel	NPL	KPMM	LDR	ROA	MOWN	OUT	BOD	SIZE	AGE
NPL	1	.021	.415**	-.336**	-.013	.060	-.168*	-.166*	-.038
KPMM	.021	1	-.061	.012	.024	-.046	.042	-.280**	-.026
LDR	.415**	-.061	1	-.077	.110	-.015	-.162	-.095	.001
ROA	-.336**	.012	-.077	1	-.004	-.089	.065	.114	.021
MOWN	-.013	.024	.110	-.004	1	-.707**	.357**	-.088	.075
OUT	.060	-.046	-.015	-.089	-.707**	1	-.309**	.156	-.010
BOD	-.168*	.042	-.162	.065	.357**	-.309**	1	.065	-.015
SIZE	-.166*	-.280**	-.095	.114	-.088	.156	.065	1	-.202*
AGE	-.038	-.026	.001	.021	.075	-.010	-.015	-.202*	1

Keterangan: *), **), masing-masing signifikan pada 5% dan 1%

sedikit jumlah *outside directors* namun makin banyak jumlah BOD. Tabel 3 menyajikan hasil uji korelasi untuk setiap variabel penelitian:

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara rasio-rasio keuangan yang menjadi ukuran kinerja keuangan BPR. Rasio NPL ditemukan berhubungan positif dengan rasio LDR dan berhubungan negatif dengan rasio ROA. Ini berarti bahwa makin tinggi risiko kredit bermasalah yang dihadapi oleh BPR, maka akan makin tinggi likuiditas perusahaan namun makin rendah *earnings* BPR. Selain itu, rasio NPL juga berhubungan negatif dengan jumlah BOD dan ukuran BPR, yaitu makin sedikit jumlah BOD dan makin kecil ukuran BPR maka makin tinggi risiko kredit bermasalah BPR. Sedangkan untuk rasio

KPMM ditemukan berhubungan negatif dengan ukuran BPR, dimana makin besar ukuran BPR maka makin rendah rasio kecukupan modal minimumnya. Hasil uji korelasi ini menunjukkan ada indikasi hubungan yang erat antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja keuangan BPR.

Pengujian Data

Dari tiga uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini (uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas), hasil pengujian menunjukkan hanya uji multikolonieritas yang lolos sedangkan uji normalitas tidak lolos dan terdapat masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian data residual tidak terdistribusi secara normal serta

faktor gangguan memiliki varians yang tidak sama (heteroskedastisitas).

Dengan menggunakan asumsi *central limit theorem*, dimana data *cross section* yang diambil dengan metode *purposive sampling* dengan sendirinya dianggap berdistribusi normal jika sampel yang digunakan telah mendekati populasi (Anggono dan Baridwan 2003). Data yang digunakan sebagai sampel penelitian ini berjumlah 141 (70,85% dari total populasi) dimana sampel penelitian ini cukup mendekati populasi sehingga berdasarkan asumsi *central limit theorem* data sampel dianggap memiliki residual yang berdistribusi normal.

Mengacu pada Gujarati (2006) suatu model regresi yang mengandung heteroskedastisitas tidak merusak sifat *unbiased* dari koefisien-koefisien metode kuadrat terkecil (*OLS*) dari model tersebut. Akan tetapi koefisien-koefisien tersebut tidak lagi efisien sehingga dapat menyebabkan inferensi dan prediksi mengenai koefisien-koefisien populasinya akan keliru. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap model regresi tersebut sehingga tidak lagi mengandung heteroskedastisitas.

Langkah perbaikan terhadap model regresi yang mengandung heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan transformasi model awal dengan menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang (*WLS*) (Gujarati 2006). *Weight variable* digunakan untuk membagi masing-masing observasi dari variabel dependen dan variabel independen, dimana nilai estimasi variabel dependen untuk masing-masing model dipakai sebagai *weight variable*. Dengan melakukan regresi menggunakan metode *WLS* tersebut maka masalah heteroskedastisitas dapat diatasi.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4 menunjukkan ringkasan hasil uji regresi dengan metode *WLS* untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan Tabel 4, hasil uji F atas persamaan regresi penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama mekanisme CG

yang dilihat dari kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors* dan jumlah BOD, beserta variabel kontrol ukuran dan umur perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR swasta yang diukur melalui NPL, KPMM, dan ROA. Ini berarti bahwa mekanisme CG mempengaruhi kemampuan BPR swasta di Jawa Tengah dalam mengelola tingkat kredit bermasalah, besaran modal sendiri, dan pencapaian profitabilitasnya. Namun hasil penelitian ini menemukan mekanisme CG tidak mempengaruhi kemampuan BPR swasta dalam aspek likuiditasnya yang diukur dengan LDR.

Mekanisme CG yang diukur dengan kepemilikan manajerial ditemukan berpengaruh positif terhadap rasio NPL dan berpengaruh negatif terhadap rasio ROA. Makin tinggi rasio NPL berarti kinerja BPR makin buruk mengingat makin tinggi tingkat kredit bermasalah (macet). Ini sejalan dengan pernyataan Nasser (2003) bahwa semakin tinggi rasio NPL berpotensi menimbulkan masalah akibat buruknya kualitas kredit yang mengganggu kinerja bank. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan manajerial akan menyebabkan meningkatnya *non performing loan* (tingkat kredit bermasalah) yang dihadapi oleh BPR dan semakin rendah tingkat profitabilitas BPR.

Dengan kepemilikan saham yang tinggi (rerata kepemilikan manajerial 36,20%) terdapat dugaan manajemen hanya berfokus mengejar target untuk mendapatkan bonus dan keuntungan yang tinggi dari kegiatan operasional BPR tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah (rerata NPL 8,54%). Meningkatnya jumlah kredit bermasalah akan berdampak pada berkurangnya profit yang dapat dicapai oleh BPR di masa yang akan datang. Di samping itu dengan kepemilikan manajerial yang tinggi dapat diduga manajemen dapat mempengaruhi proses pemilihan dewan komisaris sesuai dengan keinginan manajemen tersebut sehingga dapat mengganggu objektivitas dari dewan komisaris tersebut.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Regresi

	Variabel Dependen			
	NPL	KPMM	LDR	ROA
Konstanta	70,817	152,867	164,078	-81,822
MOWN	0,082*	-0,018	0,205	-0,207**
OUT	0,028*	-0,034	0,115	-0,756*
BOD	0,409	1,286	-7,171*	-3,979
SIZE	-2,421*	-5,505*	-2,678	8,064*
AGE	-1,426*	-0,335	-0,185	-1,864*
F	69,351*	12,420*	1,311	9,614*
Adj. R ²	0,709	0,290	0,011	0,239

Keterangan: *), **), masing-masing signifikan pada 5% dan 10%

Tingginya rata-rata tingkat bunga atas kredit yang diberikan serta kemudahan pemberian kredit oleh BPR dibandingkan bank umum, juga menjadi pendorong tingginya tingkat kredit bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lasfer dan Faccio (1999), Suranta dan Machfoedz (2003), Siallagan dan Machfoedz (2006) yang membuktikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Namun hasil ini tidak sesuai dengan prediksi dan penelitian terdahulu oleh Jensen dan Meckling (1976), Iturriaga dan Sanz (1998) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) yang menyatakan ada hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan.

Temuan ini juga mendukung penelitian Morck et al. (1998), McConnell dan Servaes (1990, 1995) sebagaimana dikutip dalam Faizal (2005) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang non monotonik antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitiannya Morck et al. (1998) dalam Faizal (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial pada level 0%-5% akan berhubungan positif terhadap kinerja, sedangkan kepemilikan manajerial pada level

5%-25% justru berhubungan negatif dengan kinerja perusahaan.

Mekanisme CG yang diukur dengan proporsi *outside directors* juga ditemukan berpengaruh positif terhadap rasio NPL dan berpengaruh negatif terhadap rasio ROA. Ini berarti bahwa dengan semakin besarnya proporsi direksi yang bukan manajemen BPR (*outside directors*) maka makin tinggi tingkat kredit bermasalah yang dihadapi BPR dan makin rendah kemampuan profitabilitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi *outside directors* yang cukup tinggi dalam komposisi BOD belum berperan secara maksimal dalam fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Ada kemungkinan keberadaan *outside directors* hanyalah sekedar untuk memenuhi ketentuan BI akan keberadaan komisaris independen, tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Siregar dan Utama (2006) yang mengungkapkan bahwa pengangkatan direktur independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan praktik CG dalam perusahaan. Menurunnya kinerja perusahaan dengan proporsi *outside directors* yang tinggi diduga karena peran dan fungsi

outside directors belum dijalankan dengan maksimal, sehingga pengawasan terhadap manajemen menjadi lemah. Selain itu terdapat dugaan bahwa meskipun *outside directors* tidak memiliki saham di BPR tersebut, namun *outside directors* tersebut diduga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang saham mayoritas sehingga dapat mempengaruhi sifat independensi *outside directors*. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Baysinger et al. (1991), Godstein and Boeker (1991) dalam Wardhani (2006) yang membuktikan bahwa proporsi *outside directors* memiliki hubungan yang negatif dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini berlawanan dengan pandangan Beasley (1996) dalam Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan masuknya dewan yang berasal dari luar perusahaan (*outside directors*) dapat meningkatkan efektivitas BOD dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Meskipun jumlah *outside directors* meningkat namun akibat adanya intervensi dari pemegang saham mayoritas menyebabkan peran *outside directors* dalam pengawasan pada manajemen menjadi lemah. Dengan kondisi ini ada kemungkinan manajemen melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengabaikan prinsip *prudential banking* sehingga kinerja perusahaan menjadi turun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah BOD berpengaruh negatif terhadap rasio LDR. Ini membuktikan bahwa makin banyaknya personil yang duduk dalam jajaran komisaris dan direksi BPR, maka akan makin rendah kemampuan likuiditas BPR. Peraturan BI mengharuskan BPR menjaga tingkat LDR pada level 78-100%, sedangkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa kenaikan jumlah BOD membuat rasio LDR berkurang yang dapat menyulitkan BPR untuk memenuhi aturan BI tersebut. Ini berarti fungsi BPR

sebagai lembaga intermediasi tidak berjalan dengan maksimal. Akibatnya jumlah dana yang menganggur semakin besar sehingga dapat mengurangi kesempatan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yermack (1996) dalam Sam'ani (2008) dan Beiner et al. (2003) yang membuktikan bahwa pengaruh dari jumlah BOD terhadap kinerja perusahaan adalah negatif signifikan. Jumlah BOD yang besar dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, serta dapat menimbulkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan termasuk keputusan manajemen yang berkaitan dengan LDR.

Penelitian ini juga menemukan bahwa secara menyeluruh mekanisme CG tidak ditemukan berpengaruh terhadap rasio KPMM. Ini berarti keberadaan mekanisme CG di BPR tidak mempengaruhi kemampuan BPR dalam aspek permodalannya. Caprio dan Levine (2002) sebagaimana dikutip dalam Sam'ani (2008) berpendapat bahwa tingkat regulasi yang tinggi merupakan salah satu faktor yang menghambat berkembangnya mekanisme CG dalam industri perbankan. Dalam penelitian ini tingkat regulasi yang tinggi dari BI diduga menyebabkan tidak berpengaruhnya mekanisme CG terhadap kinerja keuangan BPR yang diukur dari rasio KPMM. Dari data penelitian dapat diketahui bahwa rerata rasio KPMM dari BPR sampel adalah sebesar 25,9% dimana nilai tersebut jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh BI.

Berdasarkan nilai rerata tersebut dapat diartikan bahwa usaha manajemen dalam menjaga tingkat KPMM yang layak lebih dipengaruhi oleh upaya pemenuhan aturan BI dan tidak dipengaruhi oleh besarnya kepemilikan manajerial, jumlah *outside directors* maupun jumlah BOD. Namun koefisien negatif dari kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors*

menyebabkan rasio KPMM BPR menjadi turun. Hal ini dapat dimaknai bahwa dengan persentase kepemilikan manajerial yang tinggi (36,2%) terdapat dugaan bahwa manajemen cenderung mengabaikan kelayakan penyediaan modal minimum akibat dari fokus utama manajemen adalah untuk mengejar bonus dan keuntungan yang tinggi.

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* tidak berpengaruh terhadap rasio LDR. Hasil ini berarti perubahan rasio LDR tidak dipengaruhi oleh kedua mekanisme CG tersebut dan diduga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Penelitian Nasiruddin (2005) mengungkapkan bahwa rasio LDR pada BPR sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga pinjaman pada masing-masing BPR tersebut. Sehingga dapat diduga tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* terhadap rasio LDR karena jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR lebih dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku, di mana suku bunga pinjaman ini lebih banyak ditentukan oleh BI sebagai regulator.

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel jumlah BOD tidak berpengaruh terhadap rasio ROA. Hasil ini menunjukkan besar kecilnya jumlah BOD tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya rasio ROA pada BPR. Pengaruh yang tidak signifikan dari jumlah BOD terhadap rasio ROA dalam penelitian ini dapat diduga karena BPR sampel dinilai memiliki jumlah BOD yang optimal dalam mengelola perusahaan. Dari data penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah BOD BPR sampel adalah sebesar 4 (empat) orang dan ROA yang dihasilkan memiliki rata-rata sebesar 4,4% yang menunjukkan bahwa dengan jumlah BOD tersebut dinilai mampu menghasilkan kinerja yang baik pada BPR.

Namun koefisien negatif dari jumlah BOD terhadap rasio ROA mengindikasikan bahwa jumlah BOD yang besar menyebabkan rasio ROA menjadi turun. Jumlah BOD yang besar diduga dapat menimbulkan kesulitan dalam

berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, serta dapat menimbulkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Selain itu bertambahnya jumlah BOD pada BPR akan memperbesar biaya agensi, antara lain biaya gaji, biaya rapat dan koordinasi serta biaya-biaya lain terkait dengan BOD, sehingga beban perusahaan menjadi lebih berat yang dinilai dapat menghambat kinerja perusahaan.

Variabel ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BPR swasta yang diukur dari rasio NPL, KPMM dan ROA, namun hal tersebut tidak berlaku terhadap rasio LDR. Koefisien negatif variabel ukuran perusahaan terhadap rasio NPL dan koefisien positif variabel ukuran perusahaan terhadap rasio ROA mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, pengawasan yang dilakukan oleh pelaku pasar juga meningkat yang mendorong perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik. Koefisien negatif variabel ukuran perusahaan terhadap rasio KPMM menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan menjadikan struktur modal perusahaan lebih didominasi oleh dana dari pihak ketiga dibandingkan dengan modal sendiri.

Sedangkan variabel umur perusahaan yang juga merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap rasio NPL dan ROA. Koefisien negatif umur perusahaan terhadap rasio NPL mengindikasikan semakin lama perusahaan beroperasi maka akan menurunkan rasio kredit bermasalah karena perusahaan yang lebih tua dianggap menguasai kondisi pasar dan dinamika yang terjadi didalamnya. Penelitian ini juga menemukan makin tua umur perusahaan, makin rendah kinerja profitabilitasnya. Hal ini diduga terkait dengan siklus hidup suatu perusahaan atau bisnis dimana makin lama perusahaan sudah beroperasi, maka perusahaan tersebut menjadikan profitabilitas bukan sebagai

prioritas utama pencapaian kinerja perusahaan, namun lebih kepada keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang, misalnya dengan meningkatkan aktivitas *corporate social responsibility*.

SIMPULAN

Dari hasil uji regresi yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme CG yang diwakili oleh kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah BOD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR swasta yang diukur dari rasio NPL, KPMM dan ROA. Namun mekanisme CG tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dari rasio LDR. Hasil uji secara parsial menemukan bahwa mekanisme CG yang diukur dengan kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR yang diukur dari rasio NPL dan berpengaruh negatif terhadap rasio ROA, namun tidak berpengaruh terhadap rasio KPMM dan LDR. Sedangkan variabel jumlah BOD ditemukan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dari rasio LDR.

Hal ini dapat dimaknai bahwa mekanisme CG dalam BPR swasta memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kinerja keuangan BPR dan diduga disebabkan oleh tipe *agency problem* yang muncul dalam industri perbankan. Sehingga kinerja perusahaan dalam penelitian ini diduga juga dipengaruhi oleh usaha manajemen dalam rangka pemenuhan aturan BI yang ketat dibandingkan dengan efek dari mekanisme CG pada BPR.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu periode pengamatan yang pendek dimana dalam penelitian ini hanya satu periode saja. Penelitian ini juga mengabaikan variabel aktivitas dewan komisaris serta mengabaikan variabel mekanisme pasar (tingkat suku bunga). Oleh karena itu diharapkan pada penelitian mendatang perlu untuk memperluas variabel variabel penelitian yaitu dengan memperhitungkan variabel aktivitas dewan komisaris, dimana menurut Beiner et al. (2003) dalam Sam'ani (2008), aktivitas dewan komisaris adalah

jumlah rapat dewan komisaris perusahaan. Vafeas (2000) dalam Sam'ani (2008) menilai fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris.

Penelitian mendatang juga disarankan menggunakan sampel bank umum atau industri lainnya, serta melihat karakteristik dan kualitas BOD dari tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kerja dan tingkat keaktifan dalam agenda rapat perusahaan, jika datanya memungkinkan tersedia. Selain itu dalam penelitian mendatang perlu untuk menambah periode pengamatan untuk dapat mengetahui efek mekanisme CG terhadap perubahan kinerja keuangan. Selain itu dari hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme CG tidak memiliki pengaruh terhadap rasio LDR, sehingga dalam penelitian mendatang perlu untuk menggunakan ukuran mekanisme CG yang lain dan memperhatikan variabel mekanisme pasar yang dinilai dapat mempengaruhi rasio LDR.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, A., dan Zaki Baridwan. 2003. *Pengaruh Kebijakan Pembagian Dividen, Kualitas Akrua, dan Ukuran Perusahaan Pada Relevansi Nilai Dividen, Nilai Buku dan Nilai Laba*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan)*. Diunduh tanggal 10 September 2010, <http://eprints.undip.ac.id>.
- Bank Indonesia. 2006. *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat – Bank Indonesia, Jakarta.
- Baysinger, B.D, Kosnik R.D, and Turk T.A. 1991. Effect of Board and Ownership Structure on Corporate Research and Development Strategy. *Accounting and Managerial Journal*, 34 (1), 205-214.

- Beiner, S., W. Drobetz, F. Schmid and H. Zimmermann. 2003. *Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?*, National Centre of Competence in Research Financial Valuation and Risk Management, Working Paper No. 89. Diunduh tanggal 25 Mei 2012, http://www.econbiz.de/archiv1/2008/50074_boad_size.pdf.
- Belkhir, Mohamed. 2008. Board of Directors' Size and Performance in The Banking Industry. *International Journal of Managerial Finance*, 5 (1), 201-221.
- Boediono, Gideon SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Brigham, E.F., and J.F.Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto, Buku I, Edisi 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Christiawan, Y.J., dan J. Tarigan. 2007. Kepemilikan Manajeral : Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1, 1-8.
- Chtourou S.M., J. Bedard, and L.Courteau. 2001. *Corporate Governance and Earnings Management*. Working Paper. Diunduh tanggal 25 Mei 2012, <http://papers.ssrn.com>.
- Darmawati, D., Khomsiyah dan R.G. Rahayu. 2004. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Diyah, P., dan E. Widanar. 2009. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*, 12, 71-86.
- Faizal. 2004. *Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar.
- Fama, Eugene F. 1980. Agency Problems and The Theory of The Firm. *The Journal of Political Economy*, 88 (2), 288-307.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Helfert, Eirich A. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jensen, M.C., and W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, M., dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*. BPFE. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Lasfer, M., and M. Faccio. 1999. *Managerial Ownership, Board Structure and Firm Value: The UK Evidence*. Working Paper. Diunduh tanggal 10 September 2010, www.ssrn.com.
- Midiastuty, P.P. dan M. Mahfoedz. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Nasiruddin. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio (LDR) di BPR Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang*. Tesis Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Nasser, ETTY M. 2003. Perbandingan Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan Rasio CAMEL Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 3 (3), 217-236.

- Nasution, M. dan D. Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004, Tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Diunduh tanggal 10 September 2010, www.bi.go.id.
- Raheja, Charu G. 2005. Determinants of Board Size and Composition: A Theory of Corporate Boards. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 40 (2), 283-306.
- Rezaee, Zabihollah. 2009. *Corporate Governance and Ethics*, 1st Edition, John Wiley & Sons Inc., USA.
- Richardson, Vernon J. 1998. *Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence*. Working Paper. Diunduh tanggal 26 Mei 2012, <http://papers.ssrn.com>.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007*. Tesis S2 Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang. Diunduh tanggal 10 September 2010, <http://eprints.undip.ac.id>.
- Siallagan, H., dan M. Machfoedz. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Siregar, S.V., dan Siddharta Utama. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, IX (3), 307-326.
- Sukartha, I Made. 2007. *Pengaruh Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial Pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi*. FE Jurusan Akuntansi Universitas Udayana, Bali. Diunduh tanggal 10 September 2010, <http://ejournal.unud.ac.id>.
- Suranta, E., dan M. Machfoedz. 2003. *Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/28/DPBPR, *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat*, 12 Desember 2006. Diunduh tanggal 10 September 2010, www.bi.go.id.
- Tjager, I.N., F.A. Alijoyo, H.R Djemat, dan B. Soembodo. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Ujiyantho, M.A., dan B.A. Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*. Diunduh pada tanggal 10 September 2010, www.bpkp.go.id.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*. Diunduh tanggal 10 September 2010, www.bi.go.id.
- Tania, Grace. 2009. *Efektivitas Promosi dalam Dua Perusahaan (Indosat dan Telkomsel) pada Industri Telekomunikasi Seluler*. Skripsi S1 FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wardhani, Ratna. 2006. *Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.

- Weir, Charlie, O. Talavera, and A. Muravyev. 2000. *Performance Effects of Appointing Other Firms' Executive Directors to Corporate Boards: An Analysis of UK Firms*. Working Paper. Diunduh tanggal 25 Mei 2012, <http://www.talavera.rv.ua>.
- Wulandari, Ndaruningpuri. 2005. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia*. Thesis Program Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.